

Judul : Usulan solusi masalah pemadaman listrik bergilir
Tanggal : Selasa, 23 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Usulan Solusi Masalah Pemadaman Listrik Bergilir

Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di beberapa wilayah dikeluhkan masyarakat. Untuk itu, perlu segera ada solusi agar pemadaman tersebut cepat teratasi. PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman tersebut. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, gangguan pasokan batu bara berkali-kali menengah medium range coal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pasokan listrik. Selain itu, PLN juga menghadapi kendala teknis pada dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) besar milik perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) yang menjadi mitra Perseroan.

"Atas nama PT PLN (Persero), kami ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat akibat peristiwa ini," kata Darmawan, dalam video yang diunggah di Instagram @pln_id, Sabtu (20/6/2026). Menurut Darmawan, PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan para pemasok batu bara yang telah mendapat pengusutan dari Pemerintah. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama Ditjen Minerba agar pasokan batu bara berkali-kali menengah dapat segera tersalurkan ke pembangkit.

"Saat ini proses penyaluran medium range coal mulai mengalir ke PLTU di seluruh Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN maupun milik mitra kami atau PLTU independent power producer," terang Darmawan. Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menerangkan, pemadaman listrik bergilir mengganggu aktivitas masyarakat. Keluhan pun datang dari berbagai daerah, mulai dari pelaku UMKM yang kehilangan omzet, peralatan elektronik rusak dan bahan makanan yang membusuk. "Persoalan bukan hanya listrik padam, tetapi juga ketidakjelasan

informasi yang diterima masyarakat," ungkap Mufti, kepada Rakyat Merdeka melalui WhatsApp, Sabtu (20/6/2026). Di satu sisi, lanjut dia, Pemerintah dan PT PLN (Persero) menyatakan pasokan listrik aman. Di sisi lain, pemadaman bergilir masih terjadi di banyak daerah dengan durasi yang semakin lama. "Kondisi ini membuat rakyat resah," keluh Mufti. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai, PLN harus segera menangani pemadaman listrik bergilir, khususnya yang terjadi di wilayah Jawa, Sumatera, dan Bali, baik dari aspek pasokan batu bara maupun kinerja pembangkit. "Saya tidak saja mendapatkan

laporan terkait pemadaman listrik secara bergilir dari berbagai daerah, lebih dari itu saya juga mengalaminya saat kunjungan ke daerah pemilihan di Kota Bogor pada Jumat sore (19/6/2026)," ujar Eddy, Minggu (21/6/2026). Eddy memahami bahwa akar permasalahan antara lain berawal dari kurangnya pasokan batu bara jenis medium rank coal ke pembangkit-pembangkit PLN sehingga terpaksa dilakukan pengalokasian beban listrik secara tidak merata. Untuk mengetahui pandangan Mufti Anam dan Eddy Soeparno mengenai pemadaman listrik bergilir, berikut wawancaranya.

MUFTI ANAM, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP

PLN Harus Segera Berikan Solusi Nyata



“Pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok energi pembangkit listrik, mulai dari ketersediaan batu bara, kesiapan pembangkit, hingga sistem distribusi.

Pemadaman listrik bergilir terjadi di beberapa daerah. Apa tanggapan Anda?

Pertama, saya meminta Pemerintah dan PLN berhenti memberikan penjelasan yang normatif serta mulai menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Jika memang ada gangguan pasokan energi, sampaikan apa adanya. Jika ada masalah pada pembangkit, jelaskan secara transparan. Jangan biarkan rakyat hidup dalam ketidakpastian. Masyarakat membutuhkan kepastian kapan masalah ini selesai dan bagaimana langkah konkret Pemerintah untuk memastikan listrik tidak terus-menerus padam.

Apa dampak bagi masyarakat dari pemadaman listrik bergilir?

Listrik saat ini bukan lagi kebutuhan pelengkap, melainkan kebutuhan dasar. Ketika listrik mati, yang mati bukan hanya lampu, melainkan juga

aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, bahkan penghasilan rakyat. Ironisnya, di saat biaya hidup terus naik dan masyarakat baru saja menghadapi kenaikan harga BBM, rakyat kembali dipaksa menanggung beban tambahan akibat pemadaman listrik yang berkepanjangan.

Apa harapan Anda kepada Pemerintah maupun PLN terkait hal ini?

Saya mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan PLN bukan hanya laba perusahaan atau laporan keuangan yang baik. Ukurannya adalah apakah rakyat bisa mendapatkan listrik yang stabil ketika mereka membutuhkannya. Rakyat tidak sedang meminta listrik gratis. Rakyat hanya meminta agar ketika mereka menekan saklar, lampu menyala. Banyak rakyat sudah membayar tagihan tepat waktu, maka negara juga wajib menghadirkan pelayanan yang

tepat waktu. Hari ini rakyat merasa negara hanya hadir saat menagih rekening listrik, tetapi menghilang ketika listrik padam berjam-jam.

Solusi dari Anda terkait masalah pemadaman listrik bergilir ini seperti apa?

Pemerintah dan PLN harus segera memberikan solusi nyata. Bagi rakyat, listrik bukan sekadar gangguan teknis. Ini sudah menjadi persoalan ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat.

Solusi konkretnya seperti apa?

PLN harus mengumumkan secara terbuka kondisi listrik nasional di setiap wilayah. Jangan sampai rakyat baru mengetahui akan terjadi pemadaman setelah listrik padam. Transparansi merupakan bentuk penghormatan kepada konsumen yang telah membayar. ■ **END**

EDDY SOEPARNO, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN

Momentum Untuk Percepat Transisi Energi



“Saya meminta semua pemangku kepentingan memandang kejadian pemadaman listrik bergilir ini sebagai momentum untuk mempercepat transisi energi.

Pemadaman listrik bergilir terjadi di beberapa daerah. Apa pandangan Anda?

Saya memahami bahwa akar permasalahan antara lain berawal dari kurangnya pasokan batu bara jenis medium rank coal ke pembangkit-pembangkit PLN sehingga terpaksa dilakukan pengalokasian beban listrik secara tidak merata. Namun, di negara yang kaya akan produksi batu bara, krisis pasokan batu bara seperti ini tidak sampai terjadi.

Solusi dari Anda seperti apa?

Kami mendesak PLN untuk mengevaluasi rantai pasok batu bara, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh, agar kejadian serupa tidak terulang. Saya juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat perizinan produksi batu bara agar produsen dapat segera bekerja sehingga pasokan batu bara dalam negeri terpenuhi.

Selain itu?

Saya juga mendorong agar Kementerian ESDM melakukan pengawasan yang ketat terhadap produsen batu bara yang "nakal" dan cenderung menghindari kewajiban mereka menyediakan batu bara untuk kebutuhan domestik sesuai aturan Domestic Market Obligation.

Artinya, pemadaman listrik ini harus menjadi perhatian penting Pemerintah?

Iya. Untuk itu, saya meminta semua pemangku kepentingan memandang kejadian pemadaman listrik bergilir ini sebagai momentum untuk mempercepat transisi energi.

Langkah apa yang dapat dilakukan?

Tentu dengan membangun sumber-sumber energi terbarukan yang sebagian besar dapat menggantikan

ketergantungan listrik nasional pada batu bara. Sebagaimana saya sampaikan secara konsisten dalam berbagai forum publik, program transisi energi yang juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo perlu dipercepat agar ketegantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, khususnya di sektor kelistrikan dapat ditekan secara maksimal.

Keliptakan bahwa yang perlu menjadi perhatian, apa lagi?

Kita telah mendapatkan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) berkapasitas 100 GW dan wajib mempercepat program transisi energi berdasarkan RUPPL 2025-2034, sehingga dapat memaksimalkan sumber energi terbarukan yang tersebar di seluruh Indonesia serta memperkuat ketahanan energi nasional. ■ **END**